

**REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK
HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR**

DISERTASI

Oleh

**MARDONNA LAMTIO
2207190014**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK
HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

MARDONNA LAMTIO
2207190014



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDONNA LAMTIO

NIM : 2207190014

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM
PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK
KRIMINAL GENG MOTOR”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, September 2025



MARDONNA LAMTIO

NIM: 2207190014



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM
PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK
KRIMINAL GENG MOTOR**

Oleh:

Nama : MARDONNA LAMTIO
NIM : 2207190014
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tebuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 September 2025

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN: 951400/0304026301

Co Promotor I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 141104/0327096504

Co Promotor II

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

NIP/NIDN: -



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 13 September 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : MARDONNA LAMTIO
NIM : 2207190014
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	3.
4	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	5.
6	Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.	Penguji	6.
7	Dr. iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM
PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK
KRIMINAL GENG MOTOR**

Nama : MARDONNA LAMTIO
NIM : 2207190014
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 13 September 2025

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Ketua Program Studi Doktor Hukum

Direktur Program Pascasajana

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK : 191690/9990463325



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARDONNA LAMTIO
NIM : 2207190014
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG
MOTOR

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, September 2025



MARDONNA LAMTIO
NIM: 2207190014

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas dari Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul

: “REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada : Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku promotor yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang berharga dalam penyusunan disertasi ini, serta kepada Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Co promotor 1 yang telah meluangkan waktu dalam bimbingan ini dan juga kepada Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Co promotor 2 yang telah terus memberikan bimbingan waktu tanpa batas dan sabar mendorong peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini. Peneliti menyadari ada banyak pihak yang berperan dalam proses penyusunan disertasi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
3. Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.
4. Seluruh dosen Program Doktor Hukum yang telah berkenan menyampaikan ilmunya, sebagai dasar penguatan secara akademik dan juga memberikan motivasi untuk tetap menyelesaikan studi.
5. Seluruh jajaran Polres Jambi, Polres Bandung dan Polres Bekasi yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penulisan disertasi ini.
6. Secara khusus penulis menyampaikan kepada keluarga tercinta. Anak-anak: dan juga suami yang selalu sabar mendampingi dalam penulisan disertasi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kebersamaannya dan dukungannya.

Jakarta, September 2025

Mardonna Lamtio

DAFTAR ISI

Lembaran Judul	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Lembaran Persetujuan.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Rumusan Masalah.....	24
D. Tujuan Penelitian	24
E. Kegunaan Penelitian	25
F. Kerangka Pemikiran.....	27
1. <i>Kerangka Teori</i>	27
2. <i>Kerangka Konsep</i>	73
G. Metode Penelitian	80
a. <i>Jenis Penelitian</i>	87
b. <i>Pendekatan Penelitian</i>	92
c. <i>Spesifikasi Penelitian</i>	93
d. <i>Paradigma Penelitian</i>	94
e. <i>Jenis dan Sumber Data</i>	96
f. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	97
g. <i>Teknik Analisis Data</i>	99
h. <i>Lokasi Penelitian</i>	100
i. <i>Orisinalitas Penelitian</i>	100

BAB II REGULASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR

A. Pengertian Penegakan Hukum.....	109
B. Kebijakan Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement Policy</i>).....	114
C. Pengertian Diskresi Kepolisian	130
D. Kewenangan Kepolisian Di Bidang Penegakan Hukum.....	143
E. Kewenangan Kepolisian dalam Aspek Hukum Administrasi	154
F. Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Geng Motor.....	178

BAB III BATASAN-BATASAN PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR

A. Sejarah Pemolisian di Indonesia	208
B. Pengendalian dan Batasan-batasan Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Kriminal Geng Motor.	257

BAB IV REKONSTRUKSI DISKRESI KEPOLISIAN SEBAGAI POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL GENG MOTOR

A. Perbandingan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Beberapa Negara	295
1. <i>Jepang</i>	298
2. <i>Selandia Baru</i>	305
3. <i>Singapura</i>	310
4. <i>Malaysia</i>	315
5. <i>Belanda</i>	318
B. Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Geng Motor di Indonesia	326
C. Rekonstruksi Diskresi Kepolisian Sebagai Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Geng Motor.....	343

BAB V PENUTUP	364
A. Kesimpulan.....	364
B. Saran.....	366
 DAFTAR PUSTAKA	 368

ABSTRAK

Judul Disertasi : Rekonstruksi Diskresi Kepolisian Sebagai Politik
Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Kelompok Kriminal Geng Motor

Kata Kunci : Rekonstruksi Diskresi Kepolisian, Geng Motor, Kebijakan
Kriminal

Penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor menghadapi tantangan dalam implementasi kewenangan diskresi kepolisian. Diskresi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang memungkinkan aparat kepolisian bertindak berdasarkan penilaian situasional untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Namun, diskresi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis rekonstruksi diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Apa regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor; *Kedua*, Mengapa penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor perlu adanya batasan; *Ketiga*, Bagaimana rekonstruksi diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, diskresi kepolisian merupakan wewenang konstitusional dan legal, yang diberikan kepada pejabat kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Akan tetapi, bentuk dan pelaksanaannya belum diatur secara rinci dan sistematis dalam kaitannya dengan fenomena kekinian, khususnya kejahatan geng motor. Belum ada regulasi spesifik dan standar operasional baku mengenai diskresi dalam penanganan geng motor menyebabkan tindakan polisi sering beragam, berisiko inkonsisten dan rentan penyalahgunaan.

Kedua, kepolisian sangat diperlukan dalam penanganan geng motor, karena karakteristik kejahatannya bersifat kolektif, cepat dan sering melibatkan anak-anak. Akan tetapi, dalam hal penerapan harus mempertimbangkan prinsip hukum progresif, keadilan restoratif dan perlindungan HAM yang dapat menjadi batasan dan pengendalian diskresi kepolisian. *Ketiga*, diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor ialah dengan merekonstruksi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002. Rekomendasi dari penelitian ini ialah perlu dibentuk peraturan khusus yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai diskresi kepolisian dalam penanganan kejahatan jalanan berbasis kelompok, seperti geng motor yang mencakup klasifikasi kejahatan jalanan, SOP penggunaan, parameter legalitas dan akuntabel serta perlu

pedoman internal tentang diskresi; integritas prinsip hukum progresif dan restoratif ke dalam kebijakan polri sangat penting, khususnya untuk mendorong diversi dan pendekatan komunitas dalam penanganan geng motor anak; menolak kriminalisasi yang berlebihan; mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi sosial; perlu pengawasan ketat agar aktivitas geng motor tidak bebas berkeliaran dengan kerjasama antara Polri dan masyarakat, karena mengancam kenyamanan dan ketertiban umum, serta reformasi pendidikan hukum dan etika kepolisian harus memperkuat pemahaman terhadap batas dan tanggung jawab penggunaan diskresi, supaya aparat tidak menggunakan kewenangan dengan cara sewenang-wenang atau tanpa akuntabilitas.

ABSTRACT

Title : *Reconstruction Of Police Discretion As The Politics Of Criminal Law In Law Enforcement Against Criminal Motorcycle Gang Groups*

Keywords : *Reconstruction of Police Discretion, Motorcycle Gangs, Criminal Policy*

Law enforcement against motorcycle gang criminal groups faces challenges in the implementation of police discretionary authority. Discretion is part of criminal law policy that allows police officers to act based on situational assessments to enforce order and security. However, uncontrolled discretion has the potential to cause deviations and abuse of authority. Therefore, this study aims to reconstruct the police's discretionary authority so that it is in accordance with the principles of justice, legal certainty, and benefit in handling criminal acts committed by motorcycle gangs.

This research raises three problem formulations, namely: First, What are the regulations on police discretionary authority in law enforcement against motorcycle gang criminal groups; Second, Why does the use of police discretion in law enforcement against motorcycle gang criminal groups need to be limited; Third, How is the reconstruction of police discretion as a criminal law policy in law enforcement against motorcycle gang criminal groups. This research uses a normative juridical method with a constructivist paradigm and uses a statutory, conceptual, and comparative legal approach.

The results of the study show that : First, police discretion is a constitutional and legal authority granted to police officers as stipulated in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002. However, its form and implementation are not yet regulated in detailed and systematic manner, especially in relation to contemporary phenomena such as motorcycle gang crimes. The absence of specific regulations and standardized operational procedures on discretion in handling motorcycle gangs leads to varied police actions, which are at risk of inconsistency and abuse. Second, police authority is essential in addressing motorcycle gang crimes due to the collective, rapid, and often youth-involved nature of the offenses. However, its implementation must consider the principle of legality as long as it is exercised in accordance with police ethics, Law No. 2 of 2002, and the principles of Law No. 30 of 2014, namely for the public interest, based on objective reasons, proportional, in accordance with the law, and carried out in good faith.

Third, police discretion as part of criminal law policy in enforcing the law against criminal motorcycle gangs should be realized by reconstructing Article 18 paragraph (1) and (2) of Law 2 of 2002. The recommendations from this research are the need to establish special regulations derived from Law 2 of 2002 concerning police discretion in handling group-based street crimes, such as motorcycle gangs, which include the classification of street crimes, SOPs for

use, legality and accountability parameters, and the need for internal guidelines on discretion; the integrity of progressive and restorative legal principles into police policies is very important, especially to encourage diversion and community approaches in handling child motorcycle gangs; reject excessive criminalization, prioritize social development and rehabilitation; the need for strict supervision so that motorcycle gang activities do not roam freely with cooperation between the Police and the community, because they threaten public comfort and order, and reform legal education and police ethics must strengthen understanding of the limits and responsibilities of using discretion, so that officers do not use their authority arbitrarily or without accountability.